

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Penyu di Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi Jawa Barat

Lubis Habibullah¹

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten
lubisibul@gmail.com

Suwaib Amirudin²

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten
suwaibamirudin@untirta.ac.id

Nikki Prafitri³

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten
nikkiprafitri@untirta.ac.id

ABSTRACT

The turtle conservation area management policy is the basis for efforts to protect turtle populations that are threatened with extinction. Turtle as a protected animal, its population is important to be protected from extinction. The turtle conservation program has an important role in the management of turtle conservation as a means of achieving turtle sustainability and supporting community life. Through this policy on the management of the turtle conservation area, the Provincial Government and its working staff carry out conservation activities at Pangumbahan Beach, which is the locus of the research. The purpose of this study was to determine how the management of the conservation area in Pangumbahan Beach. Researchers used qualitative methods. The selection of research informants used purposive sampling and snowball techniques. This study uses the theory proposed by Van Metter and Van Horn consisting of 6 aspects, namely: Policy Objectives and Measures, Resources, Characteristics of Implementing Agents, Attitudes and Tendencies (dispositions) of implementing implementors, Communication between implementers, Economic, Social and Political Environment. The results of this study indicate that the Management of the Turtle Conservation Area on Pangumbahan Beach still has problems with the activities of the surrounding community such as fishermen who reflect light at night because it affects the landing of turtles who want to land on the coast to lay their eggs.

Keywords: Implementation, Policy, Conservation Area, Turtle.

LATAR BELAKANG

Kawasan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan

konservasi atau kawasan yang dilindungi ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan berbagai macam kriteria sesuai dengan kepentingannya. Pada prosesnya pengelolaan kawasan konservasi memiliki lembaga yang menaunginya bagaimana ditingkat internasional dinaungi oleh WCPA (*World Commision on Protected Areas*) yang dulunya bernama CNPPA (*Commision on National Parks and Protected Areas*) yaitu sebuah komisi di bawah IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) yang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan konservasi di dunia, baik untuk kawasan darat maupun perairan.

Kawasan konservasi dalam kategori nasional mencakup dua kelompok besar, yaitu Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Sejak diberlakukannya konsep desentralisasi, maka negara berhak melimpahkan kekuasaan dan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai keperluan dan kepentingan terkait dengan daerah tersebut. Maka atas dasar hal tersebut, pemerintah daerah berhak dan memiliki kewajiban untuk mengurus persoalan di lingkup daerah termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam dan ekosistemnya. Pendekatan konservasi dalam menetapkan Desa Pangumbahan sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan status Taman Pesisir didasarkan pada gagasan bahwa kawasan tersebut memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang harus dilindungi dan harus dilestarikan, seperti satwa penyu dan habitat penelurannya di Pantai Pangumbahan dan sekitarnya serta beberapa tempat lainnya di sepanjang pantai Kabupaten Sukabumi (Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020).

Namun seiring berjalannya waktu, ancaman kelestarian jenis dan habitatnya menjadi semakin nyata dan menunjukkan adanya peningkatan. Hal tersebut membuat meningkatnya pula upaya-upaya konservasi untuk dilakukan dalam melindungi kelestarian yang ada di dalam suatu daerah yang di selanjutnya dibangun dengan kerja sama multi pihak baik internasional maupun nasional. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi dapat dilihat melalui Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pelaku perdagangan (penjual dan pembeli) satwa dilindungi seperti penyu itu bisa dikenakan hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 100 Juta.

Masyarakat mendukung sepenuhnya Pantai Pangumbahan dijadikan kawasan konservasi penyu dan menganggap bahwa penyu perlu dilestarikan. Namun demikian,

masyarakat belum merasakan peningkatan pendapatan setelah Pantai Pangumbahan ditetapkan sebagai kawasan konservasi penyu. Selain Peran Pemerintah, Masyarakat juga berperan sebagai kunci keberhasilan lestarnya sebuah kawasan konservasi. Hal tersebut dikarenakan masyarakat merupakan elemen yang paling dekat dengan Kawasan Konservasi Penyu maka dari itu masyarakat merupakan garda terdepan dalam menjaga maupun mengembangkan kawasan, sehingga tercapai kondisi konservasi yang harmonis. Salah satu ancaman kelestarian nyata yang terjadi di Kawasan Konservasi Pantai Pangumbahan yakni meningkatnya penjualan telur penyu oleh masyarakat. Penjualan telur penyu di sekitar Kawasan konservasi dapat berpotensi pada langkanya telur penyu maupun populasi penyu di Pantai Pangumbahan di masa depan.

Peran *stakeholders* dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Penyu menjadi sangat krusial bagi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan Konservasi Kawasan Penyu di Pantai Pangumbahan, Sukabumi. Penjelasan yang telah disampaikan di atas melatarbelakangi dalam penentuan masalah pada penelitian ini yaitu *pertama*, masih kurang maksimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi dalam strategi pengelolaan Kawasan konservasi sumber daya Kawasan penyu. *Kedua*, masih kurang efektifnya program perlindungan habitat alam dan kolaborasi antara *stakeholders* yang dilihat melalui adanya kerusakan habitat penyu yang ada di Kawasan konservasi penyu. *Ketiga*, belum adanya penguatan Peraturan Daerah terkait pengelolaan kawasan konservasi ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Dye (dalam Agustino, 2017) menulis pula kebijakan sebagai: "*Anything a government chooses to do or not to do*." Menurut takrif ini, semua pilihan-pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu adalah kebijakan Publik. Model Proses Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa sebuah performa kebijakan pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja terhadap implementasi dari kebijakan tersebut yang berlangsung dalam hubungannya dengan berbagai variabel yang di antaranya yakni: Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Komunikasi antar organisasi, Sikap para pelaksana. Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi. Smith dan Lamirer (dalam Wahab, 2012) mengemukakan bahwa sifat dari

Kebijakan Publik bukanlah bidang singular, tetapi bersifat jamak. Maka dari itu, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kebijakan publik dianalisis atau dipelajari tidak hanya diminati oleh disiplin ilmu tertentu. Maka dari itu, tidak mengherankan bahwa setiap disiplin ilmu memiliki definisinya masing-masing terkait dengan kebijakan publik.

METODE

Peneliti menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menggunakan data penelitian yang berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian dari angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006), Penelitian Kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Definisi konseptual memberikan penjelasan tentang konsep dan variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara kepada orang yang dianggap berwenang atau mengetahui tentang bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi penyu di kecamatan Ciracap, kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (*Purposive*). Untuk memudahkan penyampaian informan penelitian maka peneliti mengelompokkan informan penelitian ke dalam tabel berikut: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat (Cabang Selatan) & *turtle conservation*. (*Key Informan*), Satuan Pelayanan Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan (*Key Informan*), Kecamatan Ciracap (*Key Informan*), Kepala Desa Pangumbahan (*Key Informan*), Kelompok Konservasi Penyu Sukabumi (*Secondary Informan*), Kelompok Darma Wisata Ekopatih (*Secondary Informan*), Masyarakat (*Secondary Informan*)

Selanjutnya bagaimana diketahui dalam sebuah penelitian penting sekali untuk adanya sebuah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik data kualitatif model Interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (dalam Huberman dan Saldana, 2014), mengemukakan bahwa Analisis data kualitatif di analisa sebagai tiga arus aktivitas bersamaan: (1) kondensasi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan / verifikasi data. Dengan demikian yang kami sarankan, analisis kualitatif perlu didokumentasikan dengan baik sebagai suatu proses utamanya untuk membantu dalam mengetahui penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Pembahasan hasil penelitian adalah lebih lanjut dari hasil analisis data, mencakup yang ditujukan untuk memaparkan lebih lanjut lagi terkait masing-masing indikator teori Van Metter dan Van Horn dapat diketahui yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) para pelaksana, Komunikasi antar organisasi, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Berdasarkan hasil analisis peneliti pada dimensi Ukuran dan tujuan kebijakan seperti yang telah diungkapkan oleh DKP Provinsi Jawa Barat/Cabang Wilayah Selatan telah sesuai dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 dan juga Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi dan Pulau-Pulau Kecil Pantai Penyu Pangumbahan dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Pada kebijakan tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati dan juga menjaga keseimbangan ekosistemnya serta dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mutu kehidupan manusia.

Pada bagian Sumber Daya Manusia peneliti melihat bahwa telah cukup selain Dinas terkait serta berkolaborasi dengan instansi lainnya dengan cakupan serta fokusnya masing-masing dalam lingkup konservasi penyu itu sendiri. Selain itu, dukungan terhadap masyarakat juga muncul menambah sumber daya yang ikut membantu serta berkolaborasi dalam hal konservasi penyu itu sendiri. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial juga harus tersedia, karena menjadi salah satu hal yang menggerakkan kebijakan tersebut. Pemerintah dengan sadar menyediakan sumber dana yang bersumber dari APBD, DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Pusat serta bantuan hibah dari *stakeholder* baik dalam bentuk barang atau materi.

Selanjutnya pada sumber daya sarana dan prasarana juga harus tersedia dengan baik karena berkaitan dengan operasional dari implementasi kebijakan itu sendiri. Melalui hasil penelitian lapangan, sumber daya sarana dan prasarana sudah cukup memadai dalam upaya pengelolaan wilayah konservasi penyu di Kecamatan Ciracap ini. Sumber daya waktu juga

menjadi hal yang diperhatikan di mana suatu kebijakan berdasarkan temuan dari lapangan melalui wawancara dikatakan bahwa suatu program mempunyai durasi selama 5 (lima) tahun sehingga dengan waktu tersebut, agen pelaksana harus memanfaatkannya sebaik mungkin yang dapat mendorong kesuksesan dari implementasi kebijakan ini.

Berdasarkan hasil analisa di atas dapat dikatakan terkait dengan dimensi sumber daya manusia, finansial, sarana dan prasarana, serta waktu sudah cukup baik bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat (Cabang Wilayah Selatan) untuk mengelola kawasan konservasi penyu di Kecamatan Ciracap tersebut. Dalam temuan lapangan pada dimensi ini, dapat diketahui bagaimana karakteristik dari agen pelaksana mempunyai keberagaman mulai dari instansi yang berperan sebagai koordinator, pelaksana program instansi yang memiliki wewenang, *stakeholder* yang membantu pelaksanaan program, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu, SOP yang nantinya akan di lampirkan pada penelitian ini sudah cukup jelas menjabarkan prinsip dasar serta penyelenggaraan pengelolaan konservasi penyu ini sudah baik bersamaan dengan program-program yang dijalankannya.

Diketahui bahwa pihak yang terlibat memahami bagaimana kebijakan ini secara cepat dilaksanakan karena langsung diterjemahkan menjadi tupoksi serta menjalankan program-program yang terkait. Selain pemahaman, dukungan juga dibutuhkan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Desa, dan juga masyarakat yang mendukung kebijakan ini karena wilayah Pantai Pangumbahan sebagai habitat penyu harus dijaga dari kepunahan serta dimanfaatkan melalui ekowisata yang mendorong kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Komunikasi Antar Organisasi. Koordinasi merupakan suatu bentuk komunikasi yang baik dalam suatu pelaksanaan kebijakan. Tanpa adanya koordinasi, maka program tersebut tidak berjalan secara optimal. Peneliti melihat bahwa terdapat komunikasi yang baik dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat (Cabang Selatan) dalam mengkoordinasikan kebijakan mengenai Pengelolaan Kawasan Konservasi Penyu di Kecamatan Ciracap ini. Dalam temuan lapangan, peneliti melihat bahwa DKP Provinsi Jawa Barat (Cabang Selatan) memberi komunikasi yang diterjemahkan ke dalam beberapa bentuk program seperti rapat koordinasi baik dengan instansi terkait, *stakeholder* yang terlibat, atau pun masyarakat sebagai salah satu sasaran dari kebijakan ini.

Kondisi lingkungan eksternal baik dari ekonomi, sosial dan politik tentu mempengaruhi suatu proses implementasi kebijakan publik di samping dari lingkungan internal. Peneliti

melihat kondisi ekonomi, sosial, politik turun mendukung pelaksanaan program karena telah timbul kesadaran bagi masyarakat itu sendiri mengenai pentingnya menjaga konservasi penyu. Selain itu, masyarakat juga sadar akan arah dari konservasi ini juga ditujukan untuk pembangunan yang mendorong kesejahteraan dari masyarakat. Sebelumnya pada Perda No 5 Tahun 2009 di Kabupaten Sukabumi, lingkungan eksternal memberi kekhawatiran karena memberi ruang kepada penjualan telur penyu yang mengganggu habitat dari penyu itu sendiri. Sehingga, setelah mendapat kritik terhadap ketidaksesuaian kepentingan antara kelompok yang mendukung konservasi maka Perda tersebut dicabut. Berdasarkan hasil temuan lapangan, masyarakat mendukung upaya konservasi ini dengan harapan agar terjaganya populasi penyu yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui ekowisata yang tidak mengganggu habitat dari penyu itu sendiri

KESIMPULAN

Kekurangan dari kebijakan ini adalah waktu pelaksanaan dengan target yang belum dijelaskan secara lebih rinci tentang target dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat (Cabang Wilayah Selatan) selama program ini berjalan dan solusi terhadap target apabila para agen pelaksana tidak mencapai target tersebut mengingat habitat penyu yang semakin terancam maka pemerintah harus bekerja secara lebih efisien bukan hanya terhadap pemahaman akan kebijakan, melainkan harus terdapat target waktu yang ditetapkan sehingga suatu kebijakan tersebut dapat berjalan secara efisien. Selanjutnya dari sarana dan prasarana wisata yang menambah kenyamanan wisatawan seperti akses internet dan juga aliran listrik perlu menjadi perhatian dari pemerintah agar wisatawan semakin nyaman dan menunjang pendapatan bagi masyarakat. Selain itu, wewenang terkait pengawasan serta perhatian terhadap aktivitas masyarakat seperti perdagangan di lokasi wisatawan serta hal yang cukup penting adalah bagaimana solusi pemerintah terhadap aktivitas nelayan yang memantulkan cahaya pada malam hari karena berdampak kepada penyu yang hendak naik ke pesisir untuk bertelur.

REFERENSI

- Akib, Haedar. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).
- Ario, R. (2016). *Pelestarian Habitat Penyu Dari Ancaman Kepunahan Di Turtle Conservation And Education Center (TCEC)*. Bali: TCEC.
- Ario, R. (2016). *Pelestarian Habitat Penyu Dari Ancaman Kepunahan Di Turtle Conservation And Education Center (TCEC)*. Bali: Pelestarian Habitat Penyu Dari Ancaman Kepunahan Di Turtle Conservation And Education Center (TCEC).
- Azkab, M. (1999). *Penyu hijau, Chelonia mydas, yang senang melahap lamun hijau segar*. Oseanologi- LIPI.
- Fauzi, & Sanna, A. (2005). *Pemodelan Sumberdaya Perikanan dan Lautan untuk Analisis Kebijakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gustama, K. S. (2016). Implementasi Kebijakan Konservasi Penyu dalam melestarikan Habitat Penyu. *Skripsi. Universitas Lampung*.
- Harteti, S., Basuni. S., Masy'ud, B & Yulianda, F. (2014). Peran Para Pihak Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Penyu Pangumbahan. *Jurnal Analisis kebijakan Kehutanan*, 11(2).
- Hartono, T., Kartodihardjo, H., Purbayanto, A., & Satria, A. (2012). Institusi Pengelolaan Sumberdaya Alam Untuk Konservasi Penyu yang Efektif (Studi Kasus di Wilayah Pesisir Ujung Genteng – Pangumbahan, Kabupaten Sukabumi). *Disertasi, Bogor IPB University*.
- Irwin, R. (2014). Pelaksanaan Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap perburuan dan perdagangan ilegal telur penyu di Kecamatan Tambelan.
- Ismene. (2018). Keberlanjutan Pengelolaan Kawasan Konservasi Penyu di Pantai Pangumbahan. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (JPSL)*, 8 (1).

- Kurniadi, B., Munggaran, N., & Rachman, F. (2021). Komunikasi Organisasi pada Impelementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal SOSPOL*, 26 (1).
- Kurniawan, W., & Maani, K. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Menggunakan Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1 (4).
- Lizawati. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pelestarian Penyu Hijau Oleh World Wildlife Fund (WWF) di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. *Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara*, 5(2).
- Mansur, T., & Marzuqi. (2018). Management Of Regional Marine Conservation Area (KKPD) in Aceh Province Based On Hukum Adat Laot. ***Jurnal Geuthèë Institute***.
- Nurhayati, A., Herawati, T., Nurruhwati, I., & Riyantini, I. (2020). Tanggung Jawab Masyarakat Lokal pada Konservasi Penyu Hijau (*Chelonia Mydas*) di Pesisir Selatan Jawa Barat. *Jurnal Perikanan*, 22 (2).
- Syaiful, N., Nurdin, J., & Zakaria, I. (2013). Penetasan Telur Penyu Lekang(*Lepidochelys olivacea* Eschscholtz,1829) pada Lokasi Berbeda di Kawasan Konservasi Penyu Kota Pariaman. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 2(3).
- Suwelo, L., Saddon, S., & Adang. (2000). *Sistem konservasi penyu pantai Pangumbahan dalam mendukung Pengendalian populasi penyu di Bali dan daerah di Pulau Jawa. dalam: suwelo S.* Bandung: Expo Jabar.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahjuhardini, P. (1992). *Studi beberapa aspek biologi penyu sisik (Eretmochels imbricata L). di Kepulauan Seribu*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Yalia, M. (2014). Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional di Jawa Barat. *Patanjala*, 6 (1)

Internet, Dokumen, dan Sumber lainnya

- Sukabumiupdate.com. (2019, Apr 29). *PT Indonesia Power Salurkan CSR, Sambangi Konservasi Penyu dan Batik P*. Retrieved from <https://sukabumiupdate.com/https://sukabumiupdate.com/posts/54646/pt-indonesia-power-salurkan-csr-sambangi-konservasi-penyu-dan-batik-purwasedar>
- Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2020, April 13). Retrieved from <http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan-konservasi/details/1/78>,
- WWF. (2020, Apr 4). Retrieved from <https://www.wwf.id>
- Kemenkumham. (2020, Maret 4). *BERITA NEGARA TAHUN 2013 KEHUTANAN*. Retrieved from <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kerja/bn.php?t=2013&i=u>
- IDNTimes Jabar. (2019, Jun 24). *Populasi Penyu Hijau di Pantai Sukabumi Menipis, Apa Upaya Pemerintah?* Retrieved from <https://jabar.idntimes.com/https://jabar.idntimes.com/news/jabar/galih/populasi-penyu-hijau-di-pantai-sukabumi-menipis-apa-upaya-pemerintah>
- Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam. (2020, Maret 4). Retrieved from [pika.ksdae.menlhk.go.id: http://pika.ksdae.menlhk.go.id](http://pika.ksdae.menlhk.go.id)
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2020, April 13). *Data Kawasan Konservasi*. Retrieved from <http://kkji.kp3k.kkp.go.id/http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/basisdata-kawasan-konservasi/details/1/78>
- Sukabumiupdate. (2020, April 25). Retrieved from <https://sukabumiupdate.com/https://sukabumiupdate.com> (Ario, Pelestarian Habitat Penyu Dari Ancaman Kepunahan Di Turtle Conservation And Education Center (TCEC), 2016)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.

SK Menteri Kelautan dan Perikanan No.5/KEPMEN-KP/2016 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil pantai pangumbahan dan perairan sekitarnya di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa barat

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat (RENSTRA) Tahun 2018-2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Rekapitulasi Data Pendaratan Penyu, Produksi Telur dan Pelepasan Tukuk (Periode Tahun 2008 s.d 2020) Oleh Satuan Pelayanan Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan – CDKPWS

Profil Taman Pesisir Penyu oleh Satuan Pelayanan Taman Pesisir Penyu Pantau Pangumbahan - CDKPWS